

# Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Politeknik Negeri Bengkalis

Sri Septia Ningsih<sup>1\*</sup>, Nurhazana<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Politeknik Negeri Bengkalis/ Program Studi Akuntansi Keuangan Publik/ Bengkalis, Indonesia, 28711  
Email: [septiatj12@gmail.com](mailto:septiatj12@gmail.com) No. HP: 082283824998

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Bengkalis/ Program Studi Akuntansi Keuangan Publik/ Bengkalis, Indonesia, 28711  
<Email: [nurhazana@polbeng.ac.id](mailto:nurhazana@polbeng.ac.id) No. HP: 081365367222

## Abstract

*State Polytechnic of Bengkalis is a Vocational Higher Education Institution. Inventory refers to assets in the form of goods or supplies intended to support operational activities. This research aims to examine the management of consumable inventory within the Higher Education environment, focusing on State Polytechnic of Bengkalis as a case study. Consumable inventory plays a crucial role in supporting the operations of the Higher Education institution, encompassing all types of materials, equipment, and resources used in daily activities. This study employs a qualitative descriptive research method, involving in-depth interviews with three informants at the State Polytechnic of Bengkalis. The research findings reveal several important aspects. First, the types of consumable inventory used by the State Polytechnic of Bengkalis include consumables, maintenance materials, spare parts, raw materials, and other supplies. Second, the implementation of RI Government Regulation No. 27 of 2014 in the management of consumable inventory at the State Polytechnic of Bengkalis has not been fully realized. The management of consumable inventory at the State Polytechnic of Bengkalis includes needs planning and budgeting, procurement, usage, security and maintenance, administration, evaluation, coaching, supervision, and control. However, there are still shortcomings, such as delays in submitting inventory needs documents by each department, which results in suboptimal planning. Additionally, the absence of standardized Standard Operating Procedures (SOP) causes inconsistencies in the management of consumable inventory at the State Polytechnic of Bengkalis. Despite the lack of standardized SOP, the State Polytechnic of Bengkalis continues to ensure that the procedures used in managing consumable inventory comply with recommended standards.*

**Keywords:** *Inventory Management, Consumable Goods, State Polytechnic of Bengkalis*

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan PP RI No. 4 Tahun 2014, Perguruan Tinggi memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi dibidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Suti (2020) menjelaskan bahwa sistem tata kelola Perguruan Tinggi juga harus memperhatikan prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan ruang lingkup GUG yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar-

standar operasional yang akan menghasilkan sebuah prosedur, pedoman dan peraturan yang akan mengatur atau mengontrol semua aktivitas operasional instansi yang disebut sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Peningkatan penyusunan serta perbaikan dalam implementasi SOP pada suatu entitas akan meningkatkan kinerja manajerial secara keseluruhan (Anggareni, 2016). Tidak adanya SOP di bagian pengadaan barang habis pakai mengakibatkan pegawai yang ada harus menjelaskan secara detail dan berulang-ulang kepada rekan kerja untuk proses dan prosedur dalam pengadaan barang habis pakai yang mengakibatkan sistem pengadaan BHP tidak berjalan sesuai dengan prosedur (Sari, 2020). Sebagai lembaga Pendidikan yang aktif, Politeknik Negeri Bengkalis memiliki kebutuhan yang signifikan terkait BHP, pengelolaan BHP yang efektif dan efisien

di Politeknik Negeri Bengkalis menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan kegiatan akademik dan administratif. Semua kegiatan tersebut memerlukan dukungan BHP sebagai unsur pendukung utama. Sehingga keberadaan BHP menjadi landasan utama untuk kelancaran proses pembelajaran, penelitian, dan aktivitas administratif di lingkungan akademis (Fauziana, 2017).

Berdasarkan PP RI No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, BMN salah satunya berupa barang persediaan. Proses pengelolaan BMN mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, hingga penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan. Selain itu, proses penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindah gunaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga pembiayaan dan tuntutan ganti rugi juga merupakan bagian integral dari manajemen BMN. Keterlambatan atau ketidak sesuai perencanaan persediaan dapat menghambat operasional, seperti yang dijelaskan oleh Roza, Elfindri, & Almasdi (2020), hal ini dipengaruhi oleh kurangnya tenaga pengelola, dana yang tersedia belum mencukupi, serta kurangnya efektivitas pengawasan dan pembinaan. Dewi (2019) menjelaskan bahwa pengadaan dikatakan baik apabila alat dan bahan yang datang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, aman dalam penggunaan, dan mudah disimpan. Penelitian yang dilakukan oleh (Herwinanti, 2014) menemukan perangkapan fungsi pada sistem dan prosedur Persediaan BHP yang dapat melemahkan pengawasan. Pengelolaan Persediaan BHP yang baik dapat menjaga kelancaran dan kesinambungan kegiatan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan Persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai studi kasus.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi masalah dan upaya dalam pengelolaan Persediaan BHP serta mengusulkan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah jenis persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis?
- b. Bagaimana pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis?
- c. Apakah pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) pada Politeknik Negeri Bengkalis sesuai dengan regulasi yang berlaku?
- d. Apa peran Politeknik Negeri Bengkalis dalam upaya meningkatkan pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP)?

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui pengelolaan persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Perguruan Tinggi Vokasi

Pendidikan Vokasi merupakan salah satu jenis Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) RI No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk bekerja atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program diploma dalam Pendidikan Vokasi diselenggarakan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam keahlian terapan yang diperlukan dalam dunia kerja, dan program ini dapat mencakup tingkat sarjana terapan. Pendidikan Vokasi diantaranya meliputi Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Tinggi Vokasi. Selanjutnya, PP RI Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memberikan definisi bahwa Politeknik merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang fokus pada penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2.2 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sumadi & Ma'ruf, 2020). Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan menurut Lloyd & Aho (2020), yaitu:

### 1. Planning (perencanaan)

Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik.

### 2. Organizing (pengorganisasian)

Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada waktu yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja.

### 3. Directing, Activating, Leading (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)

Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

### 4. Controlling (mengendalikan)

Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.

## 2.3 Persediaan Barang Habis Pakai (BHP)

Barang Milik Negara sesuai PP RI No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BNM salah satunya berupa barang Persediaan. Persediaan atau sering disebut dengan barang persediaan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Pada PSAP BA No. 05 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 di jelaskan bahwa suatu aset bisa diklasifikasikan sebagai persediaan jika memenuhi kriteria diantaranya barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka untuk kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam

rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan berdasarkan PSAP 05 meliputi barang konsumsi, amunisi, barang untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan legas, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan hewan serta tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Dalam pengukuran persediaan, persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang.

Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan lainnya tidak material dan bermacam-macam jenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Pengungkapan persediaan berdasarkan PSAP 05, laporan keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
3. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### 2.4 Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Perguruan Tinggi Satuan Kerja Satker

Petunjuk Teknis Aplikasi Sakti Modul Persediaan menjelaskan pengelolaan persediaan mencakup Pengelolaan persediaan di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sebagai satker induk dan Pengelolaan persediaan di Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) sebagai satker pembantu. Ruang lingkup pengelolaan BMN berdasarkan PP 28 tahun 2020 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### 3. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Bengkalis. Objek dalam penelitian ini yakni pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP). Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu Politeknik Negeri Bengkalis sebagai Perguruan Tinggi Satuan Kerja. Jenis dan sumber data menurut cara memperolehnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian dengan cara pemeriksaan data, organizing dan Interpretasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Jenis Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis

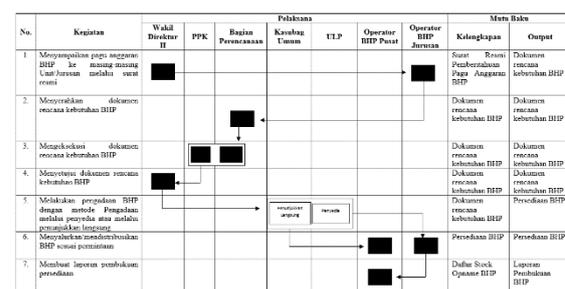
Jenis persediaan yang digunakan Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan laporan posisi persediaan di neraca meliputi: barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku dan persediaan lainnya.

Jenis BHP yang digunakan Politeknik Negeri Bengkalis mengikuti kebutuhan

yang di perlukan dalam operasional Politeknik Negeri Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis memiliki 8 jurusan dengan 21 program studi yang berbeda-beda dan memiliki 3 kampus yang tersebar di pulau bengkalis. Tentunya, dengan perbedaan bidang jurusan dan tersebarnya 3 kampus yang berbeda membuat kebutuhan yang di butuhkan juga beragam. Rincian daftar persediaan yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis tertuang dalam laporan persediaan Politeknik Negeri Bengkalis. Laporan persediaan meliputi informasi terkait persediaan yang digunakan oleh Politeknik Negeri Bengkalis selaku UAKBP, memuat informasi mengenai kodefikasi barang, nama barang dan nilai per barang.

### 4.2 Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis

Kegiatan siklus pengelolaan BHP yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bengkalis melibatkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun alur pengelolaan persediaan BHP Politeknik Negeri Bengkalis dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pengelolaan Persediaan BHP Politeknik Negeri Bengkalis (Sumber: Politeknik Negeri Bengkalis, 2024)

### 4.3 Kesesuaian Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis dengan Standar yang Berlaku

Tidak semua tahapan pengelolaan yang ada pada PP RI No. 28 Tahun 2020 dilakukan oleh Politeknik Negeri

Bengkalis. Adapun tahapan yang tidak dilakukan oleh Politeknik Negeri Bengkalis diantaranya: tidak melakukan tahapan pemanfaatan dikarenakan Politeknik Negeri Bengkalis tidak pernah melakukan pemanfaatan persediaan BHP baik dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna maupun kerja sama penyediaan infrastruktur. Tidak melakukan tahapan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan persediaan BHP baik dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah maupun penyertaan modal pemerintah pusat/daerah. Tidak melakukan tahapan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan BHP dikarenakan tidak ada kerusakan yang signifikan yang terjadi pada persediaan BHP, sehingga tidak perlu dilakukan pemusnahan maupun penghapusan, apabila terjadi barang rusak maka dianggap sebagai barang yang sudah habis digunakan.

#### **4.4 Peran Politeknik Negeri Bengkalis Dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Persediaan Barang Habis pakai (BHP)**

Program pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen persediaan dapat diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bengkalis. Ini mencakup pengajaran teori dan praktik terkait manajemen persediaan, termasuk teknik pengelolaan persediaan, prediksi permintaan, pengendalian stok, dan manajemen risiko persediaan. Para operator persediaan dan praktisi akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola persediaan dengan efektif melalui pelatihan ini. Penelitian terkait inovasi dalam manajemen persediaan BHP juga dapat dilakukan oleh Politeknik Negeri Bengkalis, yang mencakup pengembangan metode atau alat baru untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan, meningkatkan efisiensi dalam pengadaan dan penyimpanan BHP, serta melakukan studi tentang strategi pengurangan limbah atau kehilangan persediaan.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu PP RI No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi PP RI No. 28 Tahun 2020 Tentang perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN. Tahapan pengelolaan persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian persediaan BHP. Berdasarkan data dan informan yang diperoleh serta deskripsi hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Jenis Persediaan BHP yang digunakan Politeknik Negeri Bengkalis meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku dan persediaan lainnya.
- b. Implementasi PP RI No. 27 Tahun 2014 dalam pengelolaan persediaan barang habis pakai di Politeknik Negeri Bengkalis belum sepenuhnya terlaksana, pengelolaan persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Namun, masih terdapat kekurangan seperti, keterlambatan penyampaian dokumen kebutuhan persediaan BHP oleh masing-masing jurusan sehingga pelaksanaan perencanaan kebutuhan menjadi tidak optimal.
- c. Politeknik Negeri Bengkalis memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan BHP. Politeknik Negeri Bengkalis menyesuaikan pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) dengan PP RI No. 28 tahun

2020 untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun belum ada SOP resmi untuk pengelolaan BHP, Politeknik Negeri Bengkalis terus memverifikasi kepatuhan terhadap standar yang direkomendasikan dalam penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pelaporan BHP. Sistem manajemen persediaan mencatat transaksi masuk dan keluar secara akurat, didokumentasikan dengan berita acara, dan dikelola melalui syarat umum SPK untuk menjaga integritas persediaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisa data menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Politeknik Negeri Bengkalis agar setiap unit di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis dapat melakukan pengelolaan BHP dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh unit terlambat dalam menyampaikan dokumen pengajuan kebutuhan BHP, dan seringkali dalam pengajuan BHP ditemukan ketidaksesuaian, dimana barang yang diajukan bukan merupakan BHP. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah koordinasi dan komunikasi antara bidang perencanaan dan unit-unit di Politeknik Negeri Bengkalis untuk memastikan komitmen terhadap pengajuan kebutuhan BHP. Selain itu, pembakuan SOP perlu dilakukan, terutama SOP pengelolaan persediaan BHP di setiap jurusan. SOP ini harus mencakup prosedur pengajuan, verifikasi, dan pemantauan kebutuhan BHP. Jadwal pengajuan dokumen kebutuhan BHP yang jelas dan terintegritas untuk setiap jurusan harus ditetapkan. Kalender pengajuan tahunan perlu disusun dengan mengatur batas waktu pengajuan secara sistematis, serta jadwal tersebut harus disosialisasikan kepada semua unit dan pengingat berkala harus dipastikan sebelum tenggat waktu pengajuan. Pelatihan rutin dan sosialisasi mengenai

pentingnya kepatuhan terhadap tenggat waktu pengajuan dokumen perlu diadakan. Dampak keterlambatan pada proses pengelolaan persediaan BHP harus dijelaskan secara mendetail.

## Daftar Pustaka

- Anggareni, Iseu. (2016). Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Manajemen Dan SOP Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Citarum Sobat Bumi). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1-19.
- Dewi, D. A. K. D. S., Sastrawidana, D. K., & Wiratini, N. M. (2019). Analisis Pengelolaan Alat dan Bahan Praktikum Pada Laboratorium Kimia Di SMA Negeri 1 Tampaksiring. *Jurnal Pendidikan Kimia Undiksha*, 37-42.
- Fauziana, D. (2017). Pengaruh sarana dan prasarana sekolah dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di pondok pesantren al-Islam Joresan Mlarak (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Herwinanti, A. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Persediaan Bahan Habis Pakai Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Wiranas Laundry and Dry Clean Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Roza, M., Elfindri, E., & Al masdi, A. (2020). Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam

- Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 2(1), 05-15.
- Sari, F. M., & Manullang, R. R. (2020). Analisis Pengaruh Perancangan Dan Pembakuan Standar Operasional Prosedur Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Habis Pakai Pada Universitas Bangka Belitung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(2), 45-50.
- Suti, M., Syahdi, M. Z., & Didiharyono, D. (2020). Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Era Teknologi Informasi dan Digitalisasi. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 203-214.